

**Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Kecer
Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep**
*The role of the Village Head as Development Administrator in Kecer Village
Dasuk District, Sumenep Regency*

Oleh :

Moh. Fairozi Fasfayas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Sumenep

E-mail : helenzfayaz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Kecer Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian satu orang kepala desa sebagai informan kunci, empat orang perangkat desa dan BPD sebagai informan utama, dan tiga orang informan pendukung. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran interpersonal: a) sebagai simbol organisasi dengan memberi contoh baik. b) sebagai pemberi motivasi kepada perangkat desa dan masyarakat desa, c) sebagai penjaga hubungan baik dengan masyarakat dan perangkat desa. 2) Peran informasional: a) sebagai pemantau kinerja, b) sebagai pencari informasi, b) sebagai penyampai informasi. 3) Peran pengambil keputusan: a) sebagai yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan korektif, b) sebagai yang memiliki kewenangan.

Kata kunci: Peran Kepala Desa, Administrasi Pembangunan

Abstract

This research aims to determine the role of the village head as a development administrator in Kecer Village, Dasuk District, Sumenep Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative. The research subject was one village head as key informant, four village officials and BPD as main informants, and three supporting informants. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Miles and Huberman model data analysis technique. Data validity using source triangulation. The research results show: 1) Interpersonal role: a) as a symbol of the organization by setting a good example. b) as a motivator to village officials and village communities, c) as a guardian of good relations with the community and village officials. 2) Informational role: a) as performance monitor, b) as information seeker, b) as information transmitter. 3) The role of the decision maker: a) as the person responsible for taking corrective action, b) as the person with authority.

Keywords: Role of Village Head, Development Administration

1. PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan Indonesia adalah untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dimana secara khusus menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat untuk melaksanakan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan, manfaat kesejahteraan, dan aspirasi rakyat, sehingga mampu menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga memiliki hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih mempunyai hubungan kedekatannya dengan masyarakat yang merupakan suatu faktor penunjang dalam pembangunan daerah.

Pembangunan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa agar dapat mencapai kehidupan yang sejahtera, mengingat desa secara historis merupakan asal mula terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bahkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada teori negara “republik desa” (Santoso, 2021:4).

Desa selalu menjadi pusat perhatian karena desa lah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan mengantarkan ke tujuan akhir yang ditetapkan sebagai cita cita bersama. Dalam sejarah desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan desa, terakhir yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, seperti pemerataan pembangunan yang dapat menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah dijadikan landasan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja desa harus dikelola dengan baik, sehingga pembangunan desa dapat dilakukan secara terencana, dinamis, dan berkesinambungan.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi pemerintahan desa yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kepala desa dalam menetapkan peraturan desa harus bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kepala desa sebagai administrator pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan tahapan usaha bersama masyarakat dalam iklim

demokratis untuk mengadakan perbaikan, pembangunan, dan peningkatan kehidupan masyarakat, demi pencapaian kesejahteraan masyarakat di desanya. Menurut Rusyan (2018:82), “Peran kepala desa sangat penting, karena ia pemegang kekuasaan tertinggi di desa, seperti hak atas keputusan-keputusan penting di desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.” Peran tersebut meliputi peran interpersonal, informasional, dan pengambil keputusan Siagian dalam (Purwanggono, 2020:7-10).

Pembangunan desa tidak saja berupa pembangunan fisik, karena pembangunan fisik bukanlah ukuran kemajuan suatu desa secara utuh. Pembangunan fisik dengan partisipasi aktif masyarakat tentunya memiliki nilai tambah tersendiri dan dapat menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting, mengingat partisipasi ide, tenaga, dan lain sebagainya, maka pembangunan akan lebih dirasakan masyarakat, bahkan masyarakat akan lebih merasa memiliki.

Pembangunan di desa akan berhasil apabila dilaksanakan dengan partisipasi

masyarakat secara optimal melalui proses pemberdayaan. Sebab masyarakat tidak sekedar objek pembangunan namun juga subjek pembangunan. Oleh karena itu kepala desa harus mampu membangun kemitraan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desanya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat dilatih untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. Pemberdayaan kebebasan memilih, ikut serta dalam pengambilan keputusan, penghormatan, penghargaan, kerjasama, dan menumbuhkan rasa kebersamaan masyarakat (Pratama dkk, 2018:42).

Kepala Desa Kecer Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep merupakan satu dari 330 kepala desa yang menjalankan peranannya sebagai administrator pembangunan di desanya. Oleh karenanya peran kepala desa sangat strategis dalam menyelenggarakan berbagai urusan desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan urusan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan studi awal di Desa Kecer, partisipasi masyarakat Desa Kecer sebagai syarat keberhasilan pembangunan melalui proses pemberdayaan masyarakat sudah cukup optimal. Ada usaha konkret dari Kepala Desa Kecer, terutama melakukan pembangunan yang dapat mendorong pengembangan kemandirian lokal. Masyarakat Desa Kecer tidak tinggal diam ketika proses pembangunan berjalan. Partisipasi masyarakat Desa Kecer, baik itu ide, tenaga, dan harta sangat diperlukan untuk perbaikan kolektif menuju kesejahteraan bersama. Masyarakat Desa Kecer merespons pembangunan yang ada, masyarakat ikut serta dalam kegiatan gotong-royong, bahkan Kepala Desa Kecer sendiri hadir dalam kegiatan tersebut.

Pembangunan yang ada di Desa Kecer pada tahun 2023 hampir semuanya dibiayai dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Secara spesifik, DD diartikan sebagai dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui rekening kas negara ke rekening kas desa dan tercatat di rekening kas daerah dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan

untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, mendorong perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

2. LANDASAN TEORI

a. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2019:7) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Shafritz and Russel dalam (Rodiyah dkk, 2021:43) ruang lingkup administrasi publik terdiri dari: Lingkungan politik dan budaya, penerapan lanjutan dari ajaran *reinventing government*, (mewirauahakan birokrasi), hubungan antar kelembagaan pemerintahan, perkembangan teori manajemen dan organisasi, perilaku organisasi, managerialisme dan manajemen kinerja, manajemen strategis di sektor publik, kepemimpinan dan akuntabilitas, manajemen personalia dan hubungan kerja, keadilan sosial, dan manajemen keuangan.

Menurut Gray dalam (Pasolong, 2019:18), peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut: 1)

Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. 2) Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat yang melaksanakan tanggungjawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

Suatu pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Konsekuensinya bagi administrasi publik di satu pihak administrasi publik harus menyelenggarakan pembangunan, tetapi di lain pihak, administrasi publik harus melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus atau kontroversi yang timbul akibat dari pembangunan itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan adanya kemampian dari administrasi publik dalam mengambil suatu keputusan yang bijaksana sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Suardita, 2016:35).

b. Kepemimpinan

Menurut Black dalam (Sintani dkk, 2022:8), kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya

sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, Sedarmayanti dalam (Sintani dkk, 2022:9-10), menerangkan beberapa komponen kepemimpinan meliputi: Proses dalam mempengaruhi orang lain agar mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, hubungan interaksi antar pengikut dan pimpinan dalam mencapai tujuan bersama, proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan, proses memberi arti (pengarahan berarti) terhadap usaha kolektif, dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan dalam pencapaian sasaran, dan proses mempengaruhi kegiatan individu/kelompok dalam usaha mencapai tujuan pada situasi tertentu.

Terdapat beberapa teori yang melandasi kepemimpinan dalam pelayanan publik, yaitu: Pertama, teori sifat (*trait theory*) dimana kepemimpinan harus dimulai dengan memusatkan perhatiannya pada pemimpin itu sendiri. Penekanannya pada sifat-sifat yang membuat seseorang menjadi pemimpin. Kedua, teori sifat George R. Terry dimana mengelompokkan teori kepemimpinan dalam delapan teori, yaitu: 1) Teori otokratis (*the autocratic theory*), adalah didasarkan atas perintah-

perintah, pemaksaan dan tindakan yang agak arbiter dalam hubungan diantara pemimpin dengan pihak bawahan. 2) Teori sosiologis (*the sociologic theory*), adalah didasarkan bahwa kepemimpinan terdiri dari usaha-usaha yang melancarkan aktivitas para pemimpin yang berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikut. 3) Teori supportif (*the supportive theory*), adalah didasarkan bahwa pihak pemimpin beranggapan bahwa para pengikutnya ingin berusaha sebaik-baiknya dan bahwa ia dapat memimpin dengan sebaiknya melalui tindakan membantu usaha-usaha mereka. Adakalanya teori supportif dinyatakan sebagai teori partisipatif (*participative theory*). Ada juga yang menamakanya *democratic theory of leadership*. 4) Teori *laissez faire* (*the laissez-faire theory*), adalah didasarkan bahwa seorang pemimpin memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pengikutnya dalam hal menentukan aktivitas mereka. 5) Teori perilaku pribadi (*the personal-behavior theory*), adalah didasarkan bahwa seorang tidak berkelakuan sama ataupun melakukan tindakan-tindakan identik dalam setiap situasi yang dihadapi olehnya. Pemimpin seperti ini memberikan banyak kebebasan kepada pihak bawahannya, 6) Teori sifat

(*the trait theory*), adalah menekankan apa yang mungkin dimiliki oleh seorang pemimpin berupa kepribadiannya dan bukanlah apa yang dilakukan sebagai seorang kepemimpinan. Diantara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu: Intelegensi, inisiatif, energi atau rangsangan, kedewasaan emosional, persuasif, keahlian berkomunikasi, kepercayaan pada diri sendiri, perseptif, kreativitas, dan partisipasi sosial. g) Teori situasi (*the situational theory*) adalah didasarkan bahwa kepemimpinan harus terdapat cukup banyak fleksibilitas dalam kepemimpinan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi (Duadji dkk, 2019:192).

Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2009:169), terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan keberhasilan pemimpin, yaitu: 1) Memiliki akuntabilitas tinggi untuk memelopori perubahan organisasional sehingga bisa membuat perbedaan yang berarti. 2) Terbuka menerima ide inovatif untuk membangun komunikasi interpersonal yang positif. 3) Membangun kekuatan tanpa mengabaikan sisi kelemahan. 4) Berani menghadapi tantangan. 5) Proaktif menyambut peluang, 6) Belajar dari pengalaman, stabil memperbaiki kesalahan. 7)

Mengembangkan dan memotivasi peningkatan kemampuan SDM. 8) Mengoptimalkan penguasaan kompetensi sebagai pemimpin profesional. 9) Memanfaatkan *hallo effect* untuk membangun *networking*.

Adapun penjelasan singkat dari masing-masing peran tersebut menurut Siagian dalam (Purwanggono, 2020:7-10) adalah sebagai berikut: 1) Peran interpersonal merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ialah keterampilan insani (*human skill*). Keterampilan tersebut perlu karena pada dasarnya dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin berinteraksi dengan manusia, bukan hanya dengan para bawahannya, akan tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan yang dikenal dengan istilah *stakeholders* (pemangku kepentingan) di dalam dan di luar organisasi. Itulah yang dimaksud dengan peran interpersonal, dimana tercermin dalam tiga bentuk yakni: a) selaku simbol keberadaan organisasi, peran tersebut dimainkan dalam berbagai kegiatan yang sifatnya legal dan seremonial, b) selaku pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada para bawahan, c) peran selaku penghubung di mana seorang pemimpin harus mampu

menciptakan jaringan yang luas dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang mampu berbuat sesuatu bagi organisasi dan juga berbagai pihak yang memiliki informasi yang diperlukan oleh organisasi. 2) Peran informasional merupakan aset organisasi yang sangat penting karena informasi adalah sebagai bahan baku dalam proses pengambilan keputusan organisasi, agar kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Adapun peranan informasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a) seorang pemimpin adalah pemantau lalu lintas arus informasi yang terjadi baik dari maupun keluar organisasi, oleh karena itu maka seorang pemimpin harus mampu mengambil langkah-langkah untuk menyaring agar informasi yang keluar-masuk tersebut betul-betul bermanfaat bagi perusahaan dan informasi yang keluar tentunya bukanlah hal yang bersifat rahasia dan membahayakan organisasi, b) peran sebagai distributor informasi yang diterima dimungkinkan berguna dalam penyelenggaraan fungsi manajerialnya yang menuntut pemahaman yang mendalam tentang makna informasi yang diterimanya dan pengetahuan tentang berbagai fungsi yang harus diselenggarakan, c) peran selaku juru bicara organisasi dalam menyalurkan

informasi secara tepat kepada berbagai pihak di luar organisasi, terutama jika menyangkut informasi tentang rencana, kebijaksanaan, tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh organisasi. Peran ini juga menuntut pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek yang ditanganinya. 3) Peran pengambil keputusan merupakan kemampuan mengkaji terus-menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi, untuk mencari dan menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan, meskipun kajian itu sering menuntut terjadinya perubahan dalam organisasi. Peran ini antara lain: a) kesediaan memikul tanggungjawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi menghadapi gangguan serius, dimana apabila tidak segera ditangani akan berdampak negatif kepada organisasi, b) kewenangan untuk mengalokasikan dana dan daya, termasuk diantaranya wewenang untuk menempatkan orang pada posisi tertentu, wewenang mempromosikan orang, wewenang menurunkan pangkat, wewenang mencopot seseorang dari jabatannya, wewenang mengenakan sanksi dan wewenang mengalokasikan dana termasuk waktu.

3. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif

sekaligus membatasi penelitian guna menyeleksi data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2006:94). Keterbatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada teori peran kepemimpinan menurut Siagian dalam (Purwanggono, 2020:7-10), yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihimpun dari: Pertama, sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari wawancara kepala desa, perangkat desa dan BPD, dan masyarakat desa. Kedua, sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari sumber lain, sehingga hasil penelitian akan lebih akurat.

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Instrumen yang dibutuhkan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, alat perekam, kamera, dan alat tulis.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari satu orang kepala desa sebagai informan kunci yang memiliki banyak informasi dasar dalam proses penelitian ini, empat orang perangkat desa dan BPD sebagai informan utama yang dapat

mengungkap kata-kata dari tindakan yang diharapkan tentang peran kepala desa sebagai administrator pembangunan, dan tiga orang informan pendukung yang dapat memberikan informasi pelengkap dan belum disampaikan oleh informan utama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan analisa model Miles dan Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan pada saat di lapangan, data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan secara berurutan dan sistematis agar mempermudah peneliti dalam menyusun hasil penelitian (Sugiyono, 2007:338-341).

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengumpulan data. 2) Reduksi data. 3) Penyajian data. 4) Penarikan kesimpulan.

Peneliti menggunakan satu triangulasi untuk memeriksa keabsahan data, yaitu: triangulasi sumber, hal ini dilakukan agar data yang disajikan sebagai hasil penelitian nanti benar-benar objektif. Peneliti melakukan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke kepala desa dan perangkat

desa dan BPD, dilanjutkan masyarakat desa.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Peran Interpersonal

a) Sebagai Simbol Organisasi

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu menempatkan diri pada posisi yang selalu melekat dengan organisasinya. Kepala desa harus memiliki karakter dan kepribadian yang baik agar dapat membawa nama baik organisasi. Keduanya bersama-sama dapat membentuk identitas unik dan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam peran sebagai simbol organisasi, kepala desa dituntut untuk mampu mewakili organisasi ketika ada kegiatan yang bersifat formal maupun nonformal. Hal ini sesuai dengan Teori Sifat (*the trait theory*) oleh Terry dalam (Winardi, 2005:62-68), dimana teori ini menekankan apa yang mungkin dimiliki oleh seorang pemimpin berupa kepribadiannya dan bukanlah apa yang dilakukan sebagai seorang kepemimpinan. Artinya, semakain banyak variabel karakteristik, maka dapat menjamin kesuksesan seseorang pemimpin dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian diketahui bahwa peran Kepala Desa Kecer sebagai simbol organisasi dijalankan dengan cukup baik, dimana untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dan partisipasi masyarakat desa, kepala desa harus memberi contoh yang baik kepada perangkat dan masyarakat desanya agar dapat menggerakkan dan mempengaruhi, selanjutnya menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Beberapa contoh tersebut seperti kepala desa disiplin masuk kantor sesuai aturan yang ada, mengikuti upacara, menghadiri acara peresmian, menandatangani dokumen penting, menyapa tamu, menjadi tuan rumah acara-acara desa, turut hadir meramaikan kegiatan di kantor desa, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong.

b) Sebagai Pemberi Motivasi

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya harus mampu memotivasi perangkat desa secara individual. Terkait motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kecer, sejauh ini telah sesuai dalam melakukan perannya sebagai pemberi motivasi yang dikemukakan Siagian dalam (Purwanggono, 2020:7-10) dimana peran kepemimpinan diantaranya sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada para bawahannya.

Motivasi selalu diberikan terlebih dahulu kepada perangkat desa agar mau bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penciptaan suasana kerja yang harmonis juga menjadi salah satu motivasi untuk bekerja semaksimal mungkin. Kepala Desa Kecer juga dalam memberikan motivasi menghilangkan jarak antara struktur kepala desa dengan bawahannya yang memang diharapkan dapat menciptakan kekeluargaan yang tinggi agar bawahannya memiliki kenyamanan dalam pelaksanaan kinerjanya.

Motivasi yang dilakukan Kepala Desa Kecer kepada perangkat desa tidak hanya sekedar memberikan semangat dan dorongan, melainkan dengan menghadiri secara langsung dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Peran aktif Kepala Desa Kecer dalam pembangunan menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat. Demikian juga kegigihan kepala desa dalam mengupayakan kelancaran pembangunan untuk mencapai tujuan dan mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat terus-menerus menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat sekitar. Partisipasi yang dilakukan secara langsung menunjukkan bahwa Kepala Desa Kecer telah sesuai dengan Teori Psikologis (*the psychology*

theory) oleh Terry dalam (Winardi, 2005:62-68), dimana Teori Psikologis didasarkan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi terbaik dengan mendorong bawahannya untuk bekerja ke arah pencapaian tujuan organisasi.

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan Kepala Desa Kecer sesuai dengan *Trait Theory* oleh Davis dalam (Suharnomo, 2004:44), dimana figur kepemimpinan yang baik salah satunya adalah keinginan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dan berhasil. Hal ini terlihat dalam kinerjanya sehari-hari dengan perangkat desa. Kepala Desa Kecer selalu memberikan motivasi secara langsung kepada perangkat desanya. Apabila kepala desa bekerja dengan baik, maka perangkat desa juga akan mencontoh kinerja dari pemimpinnya. Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2009:169), salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pemimpin adalah mampu mengembangkan dan memotivasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

c) Sebagai Penjaga Hubungan yang Baik

Pelaksanaan pembangunan di desa, hal yang menjadi perhatian utama yaitu kepemimpinan kepala desa yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sebab, kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan harus memiliki sikap tanggap akan keadaan di wilayahnya, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilakukan kepala desa seharusnya mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting, mengingat partisipasi ide, tenaga, dan lain sebagainya, maka pembangunan akan lebih dirasakan masyarakat, bahkan masyarakat akan lebih merasa memiliki. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam rangka: (1) menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan, (2) menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan, dan (3) memberikan legitimasi atau legalitas seluruh keputusan yang diambil (Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, 2016:43).

Seorang pemimpin seperti kepala desa, diharapkan mampu melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah karena dalam Teori Situasi (*the situational theory*) oleh Terry dalam (Winardi, 2005:62-68), bahwa kepemimpinan harus terdapat cukup banyak fleksibilitas dalam

kepemimpinan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi. Artinya pemimpin yang baik harus mampu menyesuaikan kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan kondisi serta situasi yang berbeda-beda di wilayahnya.

Sejauh ini Kepala Desa Kecer berusaha memahami semua perbedaan karakter yang ada di masyarakat, yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menguatkan kinerja dari perangkat desanya terlebih dahulu. Dalam Teori Sifat (*the trait theory*), salah satu karakteristik pemimpin sukses diantaranya motivasi kepemimpinan, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan (Suharnomo, 2004:44).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala Desa Kecer lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. Dengan menciptakan hubungan yang baik, diharapkan perangkat desa merasa nyaman dengan pekerjaan mereka, sehingga tujuan dari pemerintah desa, yaitu untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan dapat segera tercapai dengan kuat dengan kekompakan pemerintah desa sendiri.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya benar-benar

dituntut untuk mampu menumbuhkan keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sikap dari Kepala Desa Kecer yang dalam melaksanakan tugasnya selalu menciptakan suasana kinerja yang lebih mengedepankan kekeluargaan antara kepala desa dan perangkat desa lainnya. Struktur organisasi dan uraian tugas hanyalah sebaga gambaran formalitas saja, namun dalam praktiknya Kepala Desa Kecer tidak terpaku dengan struktur organisasi tersebut. Semua dilakukan dengan bersama-sama, dengan saling membantu sehingga mampu mengharmoniskan pemerintah desanya terlebih dahulu. Dengan kinerja baik perangkat desa sendiri menjadi satu kekuatan untuk pemerintahan desa lebih dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat agar mau terlibat dalam pembangunan desa yang dilakukan.

Salah satu wujud menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, yaitu pengambilan keputusan oleh Kepala Desa Kecer dilakukan secara demokratis melalui musyawarah yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat dari unsur tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sehingga diharapkan pengambilan keputusan akan sesuai

dengan aturan yang ada dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Dalam setiap pengambilan keputusan kepala desa selalu meminta persetujuan dari masyarakatnya. Pengambilan keputusan Kepala Desa Kecer dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat, hal itu dapat dilihat dari adanya masukan dan saran dari masyarakat terkait keputusan itu dan selalu meminta persetujuan dari masyarakat.

Tabel 1 Kategori Peran Interpersonal

No	Kategori	Indikator	Contoh
1	Sebagai Simbol Organisasi	Memberi contoh yang baik	Disiplin masuk kantor sesuai aturan yang ada
			Mengikuti upacara
			Menghadiri acara peresmian
			Menandatangani dokumen penting
			Menyapa tamu
			Menjadi tuan rumah acara-acara desa
			Turut hadir meramaikan kegiatan di kantor desa
			Ikut serta dalam kegiatan kegiatan gotong royong
2	Sebagai Pemberi	Memberi motivasi	Menciptakan suasana kerja

	Motivasi	kepada perangkat desa	yang harmonis
		Memberi motivasi kepada masyarakat desa	Menghadiri langsung dalam setiap pembangunan
3	Sebagai Penjaga Hubungan yang Baik	Mengutamakan sistem kekeluargaan	Penciptaan suasana kerja yang harmonis, menghilangkan jarak antara kepala desa dengan bawahannya pelaksanaan kinerjanya.
		Mengedepankan keterlibatan masyarakat	Kepala desa dalam pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis melalui musyawarah yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat

2) Peran Informasional

a) Sebagai Pemantau Kinerja

Menurut Siagian dalam (Purwanggono, 2020:7-10), salah satu peran kepemimpinan yaitu peran informasional dimana seorang pemimpin harus mampu memantau lalu lintas arus informasi, baik dari dalam maupun luar organisasi, oleh karena itu maka seorang pemimpin harus mampu mengambil langkah-langkah untuk menyaring agar

informasi yang keluar-masuk tersebut betul-betul bermanfaat bagi organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kecer dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan oleh Kepala Desa Kecer dengan turun langsung ke lapangan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan pembangunan yang berjalan. Sedangkan pemantauan secara tidak langsung dilakukan Kepala Desa Kecer melalui pihak ketiga. Pemantauan secara tidak langsung lebih banyak dilakukan Kepala Desa Kecer. Kepala Desa Kecer sejauh ini lebih banyak melakukan pemantauan melalui pihak ketiga atau secara tidak langsung. Kepala Desa Kecer lebih mengandalkan kepercayaan kepada perangkat desa maupun masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan yang ada, dengan kepercayaan bahwa pembangunan dilakukan untuk dan oleh masyarakat, maka secara tidak langsung masyarakat akan semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan tersebut.

Kepemimpinan Kepala Desa Kecer pada aspek pemantauan ini menggunakan pendekatan partisipatif. Dimana kepala desa berasumsi bahwa antara kepala desa dan perangkat desa sama-sama mempunyai

kedudukan yang sama untuk saling mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan George R. Terry dalam (Winardi, 2005:62-68), bahwa Teori Supportif (*the supportive theory*) didasarkan bahwa pihak pemimpin beranggapan bahwa para pengikutnya ingin berusaha sebaik-baiknya dan bahwa ia dapat memimpin dengan sebaiknya melalui tindakan membantu usaha-usaha mereka.

Hal serupa juga dilakukan Kepala Desa Kecer dengan perangkat desa. Kepala Desa Kecer melakukan pemantauan kinerja kepada perangkat desa sendiri tidak melakukan dengan ketat, dalam artian apa yang terjadi di kantor Desa Kecer mengalir sesuai apa yang seharusnya, tidak begitu memantau dengan ketat kinerja perangkat desanya. Namun Kepala Desa Kecer percaya bahwa mereka akan bekerja sebaik mungkin karena memang pemantauan selalu diberikan oleh kepala desa. Kepala Desa Kecer selalu menerapkan kekerabatan yang baik dalam kerjanya meskipun kepala desa adalah puncak dari pemerintahan desa. Kepala Desa Kecer juga memaparkan bahwa perangkat desa mempunyai hak yang sama untuk sama-sama memantau kinerja, jadi apabila ada perangkat desa yang tidak melakukan

tugasnya dengan baik dapat diingatkan atau dilaporkan kepada kepala desa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan Kepala Desa Kecer dalam memantau kinerja perangkat desa sesuai dengan Teori Prilaku Pribadi (*the personal-behavior theory*) oleh George R. Terry dalam (Winardi, 2005:62-68), bahwa seorang tidak berkelakuan sama ataupun melakukan tindakan-tindakan identik dalam setiap situasi yang dihadapi olehnya, sehingga memberikan banyak kebebasan kepada pihak bawahannya.

b) Sebagai Pencari Informasi

Masyarakat dalam sebuah pembangunan mempunyai hak untuk terlibat di dalamnya, baik dalam perencanaan, perumusan, sampai pada pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat itu merupakan salah satu ciri dari berlangsungnya demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan melalui rapat yang mendiskusikan keinginan pembangunan wilayahnya untuk selanjutnya merumsukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Terakhir, kepala desa memutuskan atas persetujuan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kecer dalam keikutsertaan dalam

kegiatan perencanaan pembangunan cukup baik, hal ini disebabkan keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa dengan kesadaran sendiri, dalam kegiatan musrenbang lalu masyarakat hadir yang sebagai perwakilan dusun dalam hal perencanaan pembangunan. Dalam kegiatan musrenbang tersebut masyarakat diperbolehkan mengajukan saran untuk hal-hal apa saja yang cocok dibangun di desa dan dapat berguna bagi masyarakat, terutama dalam hal pembangunan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan Kepala Desa Kecer sesuai dengan Teori *Laissez faire (the laisses-faire theory)* oleh George R. Terry dalam (Winardi, 2005:62-68), bahwa seorang pemimpin memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pengikutnya dalam hal menentukan aktivitas mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perangkat desa serta masyarakat dalam perencanaan, perumusan, dan pengambilan keputusan sudah tampak di Desa Kecer. Masyarakat dilibatkan dalam proses ini untuk mengurangi adanya keputusan sepihak oleh kepala desa saja. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan yang ada dapat sesuai dengan apa yang

diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

c) Sebagai Penyampai Informasi

Informasi merupakan hal yang penting bagi masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Informasi merupakan kebutuhan dari masyarakat. Dengan adanya informasi masyarakat dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Hal ini juga terkait dengan tahapan penyampaian informasi yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Penyampaian informasi tentunya memberikan pengaruh terhadap berlangsungnya pembangunan di desa.

Proses penyampaian informasi oleh Kepala Desa Kecer dilakukan secara spontan, sehingga seluruh masyarakat dapat aktif dalam setiap kegiatan yang ada, baik mengenai pembangunan ataupun kegiatan lainya. Karena dengan adanya komunikasi, masyarakat dapat saling berinteraksi dan bertukar informasi serta saling membantu satu dengan lainnya, sehingga tidak ada masyarakat yang pasif.

Penyampaian informasi oleh Kepala Desa Kecer tentang kegiatan pembangunan atau kegiatan kerja bakti dilakukan dengan cara memberikan informasi ke perangkat desa, kemudian menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat melalui mulut ke mulut atau melalui pertemuan dan

masyarakat yang menerima informasi itu. Penyampaian informasi oleh Kepala Desa Kecer selain dilakukan melalui perangkat desa, juga disampaikan langsung kepada kepala dusun dan ketua RW untuk selanjutnya agar disampaikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan Proses penyampaian informasi oleh Kepala Desa Kecer sesuai dengan teori *Trait Theory* oleh Davis dalam (Duadji dkk, 2019:192), bahwa pemimpin seharusnya mempunyai karakter yang berorientasi pada pengikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi tentang pembangunan lebih banyak berasal dari kepala desa, sebab kepala desa merupakan jembatan atau sebagai informan masyarakat dari pihak pemerintah daerah. Informasi diberikan oleh kepala desa melalui perangkat desa, kemudian ke kepala dusun untuk disampaikan ke ketua RW yang nantinya akan diteruskan kepada masyarakat.

			yang berjalan
		Pemantau secara tidak langsung	Kepala desa lebih mengandalkan kepercayaan kepada perangkat desa maupun masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan yang ada
2	Sebagai Pencari Informasi	Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	Masyarakat dilibatkan agar pembangunan yang ada dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
3	Sebagai Penyampai Informasi	Informasi tentang pembangunan disampaikan langsung kepada perangkat desa Informasi tentang pembangunan disampaikan langsung kepada kepala dusun dan ketua RW	Masyarakat dapat saling berinteraksi dan bertukar informasi serta saling membantu satu dengan lainnya, sehingga tidak ada masyarakat yang pasif

Tabel 2 Kategori Peran Informasional

No	Kategori	Indikator	Contoh
1	Sebagai Pemantau Kinerja	Pemantau secara langsung	Kepala desa dengan turun langsung ke lapangan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan pembangunan

3) Peran Pengambil Keputusan

- a) Sebagai Orang yang Bertanggungjawab untuk Mengambil Tindakan Korektif

Kepala desa harus mampu menjalankan perannya sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan korektif berkaitan bila ada gangguan-gangguan yang muncul yang dapat berakibat langsung pada organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tindakan korektif Kepala Desa Kecer dilakukan dengan cukup baik dimana untuk meningkatkan kinerja perangkat desa butuh peran pemimpin yang dapat bertugas untuk menjaga kondusivitas organisasi, seperti menanyakan apa-apa saja kendala yang dihadapi, menyelesaikan masalah-masalah diantara perangkat desa dengan cepat mencari jalan keluarnya, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perangkat desa dalam menjalankan program pembangunan desa.

Kepala Desa Kecer juga mampu menciptakan rasa aman dan tertib pada masyarakat desa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga tidak semua permasalahan yang terjadi harus diselesaikan di pengadilan disebabkan adanya permasalahan yang dapat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa. Kepala Desa Kecer mampu membangun kembali kerukunan, menjaga keseimbangan di pedesaan, dan menegakkan kembali aturan yang ada.

Upaya yang dilakukan Kepala Desa Kecer menggunakan pendekatan Teori Sosiologis (*the sociologic theory*) didasarkan bahwa kepemimpinan terdiri dari usaha-usaha yang melancarkan aktivitas para pemimpin yang berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikut.

b) Sebagai Orang yang Memiliki Kewenangan

Kepala desa sebagai pemimpin harus mampu menjalankan perannya sebagai orang yang mempunyai wewenang yang bertujuan untuk mengambil tindakan-tindakan penting bagi organisasi dan wewenang dalam mengendalikan penggunaan sumber daya organisasi.

Kewenangan Kepala Desa Kecer sesuai dengan pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengangkat perangkat desa sebagai pembantu kepala desa yang bertugas melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membangun masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan Teori Otokratis (*the autocratic theory*) oleh George R. Terry dalam (Winardi, 2005:62-68), bahwa Teori Otokratis didasarkan atas perintah-perintah, pemaksaan dan tindakan yang

agak arbiter dalam hubungan diantara pemimpin dengan pihak bawahan.

Kepala Desa Kecer telah melaksanakan tanggungjawabnya menentukan tugas kepada seseorang dengan cara merancang struktur organisasi sehingga dapat menentukan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikoordinasikan. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat, karena tugas pemerintahan desa begitu berat, maka perangkat desa harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk dapat mendukung kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Kepala Desa Kecer telah mampu mengendalikan organisasi melalui distribusi sumber daya yang dimilikinya, penempatan staf sudah tepat dan sesuai dengan beban kerja masing-masing bidang dan melakukan penyegaran di setiap bidang bila diperlukan. Dalam hal ini, kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati. Peran tersebut merupakan peran yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena peran ini berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat desa.

Tabel 3 Kategori Peran Pengambil Keputusan

No	Kategori	Indikator	Contoh
1	Sebagai Orang yang Bertanggung jawab untuk Mengambil Tindakan Korektif	Menjaga kondusivitas organisasi	Menanyakan apa-apa saja kendala yang dihadapi, menyelesaikan masalah-masalah diantara peranagkat desa dengan cepat mencari jalan keluarnya, sehingga dapat mengoptimalk an kinerja perangkat desa dalam menjalankan program pembangunam desa
2	Sebagai Orang yang Memiliki Kewenangan	Merancang struktur organisas, menentukan pembagian tugas, dan dikoordinasi kan	Kepala mengendalikan organisasi melalui distribusi sumber daya yang dimilikinya, penempatan staf sudah tepat sesuai dengan beban kerja masing-masing bidang dan melakukan penyegaran di setiap bidang bila diperlukan

5. PENUTUP

Peran kepala desa sebagai administrator pembangunan meliputi: 1)

Peran interpersonal: a) sebagai simbol organisasi dengan cara memberi contoh yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perangkat desa dan partisipasi masyarakat. b) sebagai pemberi motivasi kepada perangkat desa agar dapat bekerja keras, suasana kerja yang harmonis dan suasana kekeluargaan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik. 3) sebagai penjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dengan cara pengambilan keputusan melibatkan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. 2) Peran informasional: a) sebagai pemantau kinerja dengan memantau langsung dilakukan dengan cara memantau sejauh mana pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Memantau tidak langsung dengan cara memberikan kepercayaan kepada perangkat desa maupun masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan yang ada, sehingga masyarakat dapat semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan. b) sebagai pencari informasi dengan cara melibatkan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, penyusunan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan melalui rapat yang mendiskusikan keinginan pembangunan di wilayahnya, sehingga pembangunan yang ada dapat sesuai dengan apa yang

diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. c) sebagai penyampai informasi yang dilakukan secara spontan dari mulut ke mulut, dari kepala desa dan perangkat desa kepada masyarakat. 3) Peran pengambil keputusan: a) sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan korektif dengan cara menjaga kondusivitas organisasi, menciptakan keamanan dan ketertiban. b) sebagai orang yang memiliki kewenangan dengan cara merancang struktur organisasi, mengendalikan organisasi, penempatan staf, dan melakukan penyegaran organisasi.

Kepala desa dan perangkat Desa Kecer sebaiknya meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga dalam menyampaikan motivasi dan informasi tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, seperti spanduk, pamflet, majalah desa, dan alat-alat komunikasi lainnya.

Kepala desa dan perangkat Desa Kecer sebaiknya pengetahuan dengan mengadakan pelatihan teknologi, informasi, dan komunikasi yang nantinya dapat memudahkan dalam sistem koordinasi pemerintahan.

Masyarakat desa Kecer hendaknya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dengan melihat tayangan berita yang informatif, sehingga dapat menjadikan pribadi yang terbuka dan dapat menerima perubahan-perubahan sosial yang masih akan terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Duadji, Noverman, dkk. (2019) *Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, Yogi Pasca, dkk. (2018). *Peremberdayaan dan Pembangunan Desa*. Riau: Draft Media.
- Purwanggono, Cuk Jaka. (2020). *Buku Ajar: Kepemimpinan*. Semarang: Wahid Hasyim University Press.
- Rodiyah, Isnaini, dkk. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Rusyan, Tarani. (2018). *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santoso, Az Lukman. (2021). *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sintani, dkk. (2022). *Dasar Kepemimpinan*. Kota Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Suardita, I Ketut. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Denpasar: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnomo. (2005). *Trait Theory, Persepsi Kesempurnaan Manusia dan Krisis Figur Pemimpin: Model Substitusi Kepemimpinan sebagai Alternatif*. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*. Volume 1 Nomor 1. 2004.
[http://eprints.undip.ac.id/14328/1/Trait_Theory%2C_Persepsi_Kesempurnaan_Manusia_dan_Krisis....by_Suharnomo_\(OK\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/14328/1/Trait_Theory%2C_Persepsi_Kesempurnaan_Manusia_dan_Krisis....by_Suharnomo_(OK).pdf).
- Winardi, J. (2006). *Manajemen Perubahan (The Management of Xhange)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno.(2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabet.